



PUTUSAN

Nomor 4901/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santoso.S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Tegalsari Kidul RT.027 RW.005 Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 4492/Kuasa/X/2024 tanggal 01 Nopember 2024 sebagai Pemohon;

melawan

XXX., tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 4901/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 01 November 2024, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon Adalah Suami Istri yang menikah secara sah dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal; 19 April 1991. Sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Register Nomor XXX, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi tertanggal : 19 April 1991 ;
2. Bahwa pada saat Pernikahan, Status Pemohon Jejaka dan Termohon adalah Perawan :
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat Tinggal bersama dirumah Orang tua Termohon kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) Tahun setelah itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang sejak awal tahun 2022 hingga saat ini Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri kurang lebih 2 (du) tahun yaitu di desa Purwoasri kecamatan Tegaldlimo kabupaten Banyuwangi, karena di Usir oleh Termohon Cuma gara gara cemburu Termohon yang tidak jelas ;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karunia seorang anak perempuan yang di beri nama XXX, 31 tahun dan saat ini sudah berumah tangga dan ikut suaminya di Jogja ;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula hidup rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan percetakan yang secara terus menerus karena menurut Pemohon sejak Termohon cemburu yang tidak karuan itu Termohon sering marah dan tidak mau melayani Pemohon untuk dalam urusan rumah tangga bahkan masakpun tidak mau dan yang paling menyakitkan bagi Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dan semua pakaian Pemohon diwadahi karung dan di buang keluar sambil mengucap jangan lagi ada di rumah ini dan di usirnya untuk pergi ;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut diatas, akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Banyuwangi karena bagi Pemohon tidak ada gunanya hubungan ini dipertahankan sebab nanti malah menambah beban pikiran dan hidup bagi Pemohon ;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan. Sehingga perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. tentang perubahan Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 1974. Tentang perkawinan tidak terwujud dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudhorotan yang lebih besar dibandingkan kebaikan bagi kedua belah pihak dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan Cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi:

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Pemohon, mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) Untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) ;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 4901/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 05 November 2024 dan Nomor 4901/Pdt.G/2024/PA.Bwi dan tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA XX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 April 1991. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama XXX. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah Orang tua Termohon kurang lebih 33 (tiga

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2024/PA.Bwi



puluh tiga) Tahun setelah itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak awal tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering marah dan tidak mau melayani Pemohon untuk dalam urusan rumah tangga bahkan masakpun tidak mau dan yang paling menyakitkan bagi Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dan semua pakaian Pemohon diwadahi karung dan di buang keluar sambil mengucap jangan lagi ada di rumah ini dan di usirnya untuk pergi kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah orang lain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah Orang tua Termohon kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) Tahun setelah itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun yang disebabkan Termohon sering marah dan tidak mau melayani Pemohon untuk dalam urusan rumah tangga bahkan masakpun tidak mau dan yang paling menyakitkan bagi Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dan

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pakaian Pemohon diwadahi karung dan di buang keluar sambil mengucap jangan lagi ada di rumah ini dan di usirnya untuk pergi, akhirnya sejak awal tahun 2022 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa Termohon sering marah dan tidak mau melayani Pemohon untuk dalam urusan rumah tangga bahkan masakpun tidak mau dan yang paling menyakitkan bagi Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dan semua pakaian Pemohon diwadahi karung dan di buang keluar sambil mengucapkan jangan lagi ada di rumah ini dan di usirnya untuk pergi sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 April 1991, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 1991, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 April 1991 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah Orang tua Termohon kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) Tahun setelah itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak awal tahun 2022 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Termohon sering marah dan tidak mau melayani Pemohon untuk dalam urusan rumah tangga bahkan masakpun tidak mau dan yang paling menyakitkan bagi Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dan semua pakaian Pemohon diwadahi karung dan di buang keluar sambil mengucap jangan lagi ada di rumah ini dan di usirnya untuk pergi kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2024/PA.Bwi



tahun;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا لَاقِ فَازًا لَّهِ سَعِيًّا

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX.) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (XXX.) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Ambari, MSI. sebagai Hakim Anggotadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman **11** dari **11** halaman, Putusan Nomor 4901/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)